

ARAH BARU PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA KELUAR DARI PERSIMPANGAN JALAN

Sholikin¹

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan warisan peradaban Islam dan sekaligus aset bagi pembangunan pendidikan nasional. Sebagai warisan, pendidikan Islam merupakan amanat sejarah untuk dipelihara dan dikembangkan oleh umat Islam dari masa ke masa. Sedangkan sebagai aset, pendidikan Islam yang tersebar di berbagai wilayah ini membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menata dan mengelolanya, sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Dalam kedua perspektif di atas, pendidikan Islam di Indonesia selalu menjadi lahan pengabdian kaum muslimin dan sekaligus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Masalah pendidikan Islam di Indonesia, jika didiskusikan, secara garis besar terbagi ke dalam dua tingkatan, yaitu makro dan mikro. Pada level pertama, pendidikan Islam bersentuhan dengan sistem pendidikan nasional dan faktor-faktor eksternal lain. Sedangkan pada level kedua, pendidikan Islam dihadapkan kepada tuntutan proses pendidikan yang efektif sehingga menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing tinggi. Berbagai persoalan dari kedua level di atas pada prinsipnya mendorong kepada perubahan arah pendidikan Islam, mengingat tantangan kontemporer dan tantangan masa depan yang berbeda dengan tantangan masa lalu. Dalam tulisan berikut akan dikemukakan secara sekilas latar belakang dan sejarah pendidikan Islam di Indonesia sebagai wawasan untuk melakukan perubahan, kemudian pembahasan berkembang ke arah penegasan visi dan strategi pembinaan pendidikan Islam, khususnya madrasah di Indonesia.

B. Pembahasan

1) Islam dan Pendidikan

Islam adalah agama yang menempatkan pendidikan dalam posisi yang sangat vital. Tidak menjadi sesuatu kebetulan jika lima ayat pertama yang diwahyukan Allah Swt. kepada Muhammad Saw., dalam QS. al-‘Alaq, dimulai dengan perintah membaca (*iqra*). Di samping itu, pesan-pesan al-Qur'an dalam hubungannya dengan pendidikan pun dapat

¹Penulis adalah mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Ampel Surabaya, dosen STIT Urwatul Wutsqo Bulurejo dan STKIP PGRI Jombang.

dijumpai dalam berbagai ayat dan surat dengan aneka ungkapan pernyataan, pertanyaan dan kisah. Lebih khusus lagi, kata '*ilm* dan derivasinya digunakan paling dominan dalam al-Qur'an untuk menunjukkan perhatian Islam yang luar biasa terhadap pendidikan.² Menegaskan kenyataan di atas, pasangan sarjana muslim kontemporer, Ismail Raji al-Faruqi dan Lois Lamnya' al-Faruq, membuat pernyataan bahwa Islam mengidentifikasi dirinya sendiri dengan ilmu. Bagi Islam, ilmu adalah syarat dan sekaligus tujuan dari agama ini.³

Peradaban Islam sejak awal juga menunjukkan prestasi yang sangat berarti dalam bidang keilmuan dan pendidikan. Pada masa permulaan penyiaran Islam, Muhammad Saw. sendiri menggunakan pendekatan pendidikan, bukan pemaksaan, untuk mengajarkan agama Islam kepada lingkaran khusus di rumah Arqam. Besarnya perhatian Muhammad Saw. terhadap pendidikan juga terlihat ketika memutuskan pembebasan bagi tahanan perang non-muslim dengan syarat yang bersangkutan terlebih dahulu mengajarkan baca tulis kepada orang-orang muslim yang masih buta huruf. Dalam perkembangan kemudian, masjid yang pada dasarnya berfungsi sebagai tempat ibadah, justeru menjadi tempat pendidikan yang menonjol pada dua abad pertama sejarah peradaban Islam. Tradisi ini terus berlanjut dan berkembang, khususnya pada masa keemasan peradaban Islam dengan pendirian lembaga-lembaga pendidikan yang bervariasi, mulai dari masjid, *khan*, *dar al-Qur'an*, *dar al-hikmah*, *dar al-hadits*, *zawiyah*, *hanaqah*, *bimaristan* sampai dengan *madrasah*. Lembaga yang terakhir ini kemudian diakui oleh banyak sarjana sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam Islam, yang memberikan sumbangan penting bagi perkembangan tradisi *college* dan universitas modern di Barat.⁴

Perhatian terhadap sejarah peradaban Islam memang sejauh ini masih berpusat kepada aspek politik yang menggambarkan pasang surut kekuasaan Islam. Dinamika dan pergumulan Islam dalam bidang pendidikan dan intelektual tergolong wilayah kajian yang masih terlantar. Meskipun demikian, beberapa sarjana telah berhasil mengungkapkan dimensi intelektual dari sejarah peradaban Islam itu dengan beberapa tesisnya yang

²Franz Rosenthal, *Knowledge Triumphant* (Leiden : E.J. Brill, 1970). Lihat juga Rosenthal, "Muslim Definitions of Knowledge," dalam *The Conflict of Traditionalism and Modernism in the Middle East* (Austin : The Humanities Research Centre, 1966).

³Ismail Raji al-Faruqi dan Lois Lamnya' al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam* (New York : Macmillan Publishing Company, 1986), 230.

⁴Untuk survei tentang perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam dan hubungannya dengan tradisi akademik Barat, lihat dua karya George Makdisi, *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West* (Edinburgh : Edinburgh University Press, 1981) dan *The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West* (Edinburgh : Edinburgh University, 1990).

menarik. Mereka mengakui bahwa pemikiran-pemikiran intelektual muslim pada masa pertengahan telah menjangkau wilayah kajian yang kompleks, mulai dari filsafat, keagamaan, humaniora sampai dengan ilmu-ilmu kealaman. Sementara itu, keseirusan para pemikir muslim dalam mensintesis pemikiran-pemikiran Yunani Kuno setidaknya telah berhasil menjembatani munculnya masa pencerahan peradaban Barat yang berlanjut hingga masa modern. Tanpa Islam bisa dikatakan tidak akan pernah muncul peradaban Barat modern seperti yang disaksikan sekarang ini.⁵

2) Eksistensi Pendidikan Islam di Indonesia

Sejalan dengan proses penyebaran Islam di Indonesia, pendidikan Islam sudah mulai tumbuh, meskipun masih bersifat individual. Para penganjur agama ini mendekati masyarakat dengan cara persuasif dan memberikan pengertian tentang dasar-dasar agama Islam. Kemudian, dengan memanfaatkan lembaga-lembaga masjid, surau dan langgar, mulai secara bertahap berlangsung pengajian umum mengenai baca tulis al-Qur'an dan wawasan keagamaan. Namun demikian, pelembagaan khusus untuk pelaksanaan pendidikan bagi umat Islam di Indonesia baru terjadi dengan pendirian pesantren. Lembaga ini diperkirakan muncul pada abad XIII dan mencapai perkembangan yang optimal pada abad XVIII. Para ahli sejarah agaknya sepakat bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia.

Semangat umat Islam untuk mendalami ajaran agama secara menyeluruh terus meningkat. Untuk tujuan ini, sebagian lulusan pesantren melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke beberapa pusat kajian Islam di Timur Tengah. Fenomena pelancongan (*rihlah ilmiah*) yang secara intensif muncul pada akhir abad XVIII ini pada akhirnya tidak saja menambah wawasan keilmuan mereka, tetapi juga menambah pengalaman dan inspirasi mereka dari gerakan modernisasi pendidikan di Timur Tengah. Lulusan-lulusan pendidikan Timur Tengah pada masa itu kemudian menjadi pemrakarsa pendirian madrasah-madrasah di Indonesia. Berbeda dengan lembaga pendidikan pesantren, madrasah yang dicontoh dari Timur Tengah itu merupakan lembaga pendidikan yang lebih modern dari sudut metodologi dan kurikulum pengajarannya.

Bersamaan dengan fenomena di atas, sebagian kalangan Islam di Indonesia juga berinteraksi dengan sistem pendidikan sekolah yang dikenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ciri lembaga pendidikan sekolah ini terletak pada orientasinya yang lebih

⁵Salah satu contoh kajian mengenai dimensi intelektual dari peradaban Islam ini, baca Mehdi Nakosteen, *History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350* (Boulder : University of Colorado Press, 1964). Lihat juga dua karya Makdisi di atas.

menekankan kepada peningkatan kecerdasan dan keterampilan kerja. Beberapa tokoh dan organisasi kemasyarakatan Islam, memprakarsai pendirian sekolah-sekolah model Belanda itu dengan menambahkan muatan agama. Di satu sisi, mereka berani mengadopsi sistem pendidikan sekolah yang dikenal sekuler, tetapi di sisi lain, mereka menjadikan lembaga pendidikan sekolah itu sebagai instrumen untuk pengajaran agama, di samping pengajaran ilmu-ilmu umum sebagaimana layaknya sekolah Belanda. Corak pendidikan seperti ini merupakan cikal bakal dari perkembangan sekolah-sekolah Islam yang marak berkembang di Indonesia hingga sekarang.

Pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, dalam berbagai bentuk dan coraknya, merupakan upaya pendidikan untuk masyarakat secara terbuka. Sampai munculnya pesantren, lembaga pendidikan di Indonesia sebelumnya cenderung bersifat sangat eksklusif. Pada masa pra-Islam, selain para rohaniawan Hindu, tidak semua orang dapat mengikuti pendidikan yang terlembagakan. Sedangkan pada masa penjajahan, sekolah-sekolah pada mulanya didirikan untuk kalangan bangsawan dan kaum penjajah. Baru setelah adanya desakan gerakan pencerahan dan perjuangan kalangan terdidik Indonesia, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan pendirian sekolah-sekolah rakyat yang lebih terbuka. Hal ini berbeda dengan pendirian madrasah dan sekolah-sekolah Islam yang sejak mula bersifat terbuka bagi masyarakat luas.⁶

Uraian singkat di atas pada dasarnya menjelaskan bahwa eksistensi dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia berasal dari proses interaksi misi Islam dengan tiga kondisi. Pertama adalah interaksi Islam dengan budaya lokal pra-Islam telah melahirkan pesantren. Meskipun pandangan ini masih kontroversial, tetapi pelembagaan pesantren tidak bisa dilepaskan dari proses akulturasi Islam dalam konteks budaya asli (*indigenous*). Kedua adalah interaksi misi pendidikan Islam dengan tradisi Timur Tengah modern telah menghasilkan lembaga madrasah. Ketiga adalah interaksi Islam dengan politik pendidikan Hindia Belanda telah membuahkan lembaga sekolah Islam. Orang mungkin mempertanyakan perbedaan antara madrasah dan sekolah Islam, tetapi dalam sejarah pendidikan di Indonesia, kedua lembaga itu lahir dari inspirator berbeda, yang satu dari lulusan Timur Tengah modern, sedangkan yang lain dari gerakan kooperatif dengan pendidikan model Belanda.

3) Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional

⁶Mengenai bagian ini lebih detail, lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah* (Jakarta : LP3ES, 1986). Lihat juga, *Sejarah Perkembangan Madrasah* (Jakarta : Departemen Agama RI, 1999) dan Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning* (Bandung : Mizan, 1995).

Saat hendak melaksanakan pendidikan untuk rakyat Indonesia, pemerintah Hindia Belanda telah memiliki lembaga pendidikan sekolah daripada lembaga pendidikan Islam. Sementara itu, lembaga-lembaga pendidikan yang disebut terakhir itu tetap berkembang atas dasar dukungan dan kekuatan masyarakat sendiri. Dengan demikian, sejak saat itu sudah dimulai kerangka dikotomik dalam sistem pendidikan untuk rakyat Indonesia, antara pendidikan pemerintah Hindia Belanda dan pendidikan Islam. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, banyak sekolah Islam yang mendapat pengakuan dan subsidi dari pemerintah, karena menggunakan sistem dan kurikulum yang hampir sama dengan sekolah-sekolah pemerintah. Sementara itu, pesantren pada umumnya tetap menjaga jarak (non kooperatif) dengan sistem pendidikan persekolahan, baik karena alasan agamis maupun politis.⁷

Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia mengembangkan lembaga pendidikan sekolah sebagai *mainstream* sistem pendidikan nasional. Secara pragmatis, hal ini dilakukan agaknya karena untuk memudahkan pengelolaan pendidikan yang diwariskan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dengan demikian, pergumulan antara sistem pendidikan nasional dengan sistem pendidikan Islam terus berlangsung. Sebagian dari proses pencarian rumusan sistem pendidikan nasional yang lebih utuh, pergumulan itu secara bertahap menghasilkan penyesuaian-penyesuaian yang signifikan. Melalui proses panjang dan melibatkan ketegangan politik antara eksponen yang berbeda pandangan, kecenderungan untuk mensintesis dua kutub pendidikan nasional dan pendidikan Islam tampaknya semakin terbukti. Perkembangan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN).

Salah satu titik penyesuaian itu terletak pada cakupan sistem pendidikan komprehensif, tidak terbatas pada jalur persekolahan. Yang disebut dengan sistem pendidikan nasional adalah satu kesatuan dari jalur dan satuan pendidikan beraneka ragam, dengan dasar dan tujuan pendidikan yang bersifat nasional. Meskipun hanya terdapat satu sistem pendidikan nasional di Indonesia, tetapi diakuinya adanya jalur, satuan, jenjang dan pengelolaan pendidikan berbeda-beda. Dengan demikian, termasuk ke dalam bagian dari sistem pendidikan nasional itu adalah lembaga pendidikan keagamaan.

Penyesuaian lain terjadi pada kurikulum pendidikan nasional yang menempatkan agama sebagai salah satu muatan wajib dalam semua jalur dan satuan pendidikan. Hal ini memberi jaminan adanya komitmen keagamaan (*religiosity*) dalam sistem pendidikan

⁷Lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah*, 71.

nasional sehingga tidak sepenuhnya bersifat sekuler. Meskipun dalam kenyataannya lembaga sekolah tetap merupakan *mainstream* dari sistem pendidikan nasional, tetapi pengajaran agama di dalam lembaga pendidikan itu merupakan kewajiban kurikuler. Para peserta didik sejak kelas 1 Sekolah Dasar sudah menerima pengajaran agama, sedikitnya sejumlah jam mata pelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum nasional.

Dalam sistem pendidikan nasional, lembaga pendidikan nasional diakui dalam jalur pendidikan sekolah. Hal ini sangat berarti dalam menghapus kesenjangan antara lembaga pendidikan sekolah dengan lembaga pendidikan madrasah sebagaimana terjadi pada masa-masa lalu. Dengan kedudukan ini, pendidikan madrasah menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum sekolah. Sebagai konsekuensinya, lulusan madrasah ini pun memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan lulusan sekolah. Persamaan status ini tidak berarti telah menghilangkan identitas dan watak keislaman dari lembaga pendidikan madrasah karena tetap dapat mengembangkan kekuatan dan ciri keagamaannya sesuai ketentuan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam pengertian ini, madrasah berarti sekolah yang berciri khas keagamaan Islam, kurang lebih sama dengan sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh organisasi dan yayasan keagamaan Islam, seperti Sekolah Muhammadiyah, Sekolah Ma'arif dan Sekolah al-Azhar.⁸

Dengan beberapa perkembangan sebagaimana digambarkan di atas, posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dapat diidentifikasi sedikitnya ke dalam tiga pengertian. Pertama adalah bahwa pendidikan Islam adalah lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren, pengajian dan madrasah diniyyah. Kedua menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah muatan atau materi pendidikan agama Islam dalam kurikulum pendidikan nasional. Ketiga adalah pendidikan Islam merupakan ciri khas dari lembaga pendidikan sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dalam bentuk madrasah dan oleh organisasi serta yayasan keagamaan Islam dalam bentuk sekolah-sekolah Islam.

4) Kondisi Obyektif Pendidikan Islam di Indonesia

Praktek pendidikan Islam di Indonesia, sebagaimana diidentifikasi di atas, mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Namun demikian, dalam perkembangan terakhir, kenyataannya menunjukkan kemajuan, setidaknya jika dilihat dari indikator kuantitatif. Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum misalnya

⁸Uraian bagus tentang hal ini, baca Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta : Logos, 1999).

berlangsung minimal dua jam pelajaran per pekan. Banyak sekolah bahkan menambah pelajaran pendidikan agama Islam bagi peserta didiknya, baik melalui penambahan jam pelajaran di kelas maupun melalui kegiatan ekstra-kurikuler. Pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah juga disemarakkan oleh paket-paket pengajaran khusus, seperti paket pesantren kilat.

Masalah klasik yang masih menjadi bahan perdebatan dalam kaitannya dengan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum adalah masalah jumlah jam pelajaran. Memang belakangan banyak keluhan muncul berkaitan dengan perilaku remaja sekolah yang kurang terpuji, seperti tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang dan pergaulan bebas. Meskipun demikian, fenomena ini sebetulnya muncul terbatas di wilayah perkotaan, khususnya di Jakarta, dan sekolah-sekolah tertentu, tetapi mendapatkan liputan media yang luas. Terhadap kerisauan ini, berbagai kalangan mempermasalahkan terbatasnya jumlah jam pelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Sementara itu, sebagai kalangan yang lain melihat faktor langkanya mata pelajaran budi pekerti dalam kurikulum sekolah.

Memperhatikan tuntutan-tuntutan di atas, pendidikan agama di sekolah-sekolah umum dilaksanakan dengan beberapa strategi. Kurikulum pendidikan agama Islam disempurnakan terus menerus sehingga mencapai komposisi materi pelajaran agama yang proporsional dan fungsional. Dengan kurikulum ini diharapkan pengajaran agama tidak membebani siswa secara berlebihan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Strategi lainnya adalah memadukan materi pendidikan budi pekerti ke dalam pendidikan agama. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi dikotomi sumber nilai bagi perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari dan sekaligus pendidikan agama mendapatkan tambahan jam pelajaran yang khusus untuk memperkuat pengajaran akhlak. Di samping kedua strategi di atas, pendidikan agama dilaksanakan dalam pengertian yang luas dengan melibatkan semua komponen melalui penciptaan kondisi agamis di lingkungan sekolah. Meskipun dengan tingkat kualitas yang berbeda-beda, pelaksanaan strategi-strategi di atas telah mewarnai kondisi pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum dewasa ini.

Gambaran situasi pendidikan Islam di Indonesia belakangan ini juga terlihat pada data perkembangan madrasah, mulai tingkat Ibtidaiyyah (MI), tingkat Tsanawiyyah (MTs), sampai dengan tingkat Aliyah (MA). Secara keseluruhan terdapat sekitar 31.485 MI/MTs dan 3.269 MA di seluruh wilayah provinsi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Berdasarkan program pendataan terhadap 21.454 MI, 9.860 MTs, dan 2.900 MA, angka

partisipasi kasar pada madrasah tingkat Ibtidaiyyah mencapai 2.894.128 murid, pada tingkat Tsanawiyah mencapai 1.813.135 murid dan tingkat Aliyah mencapai 525.596 murid pada tahun ajaran 1999-2000. Angka-angka itu menunjukkan bahwa sumbangan madrasah terhadap mobilisasi pendidikan anak-anak usia sekolah secara nasional mencapai 10,1 % dari sekitar 27.454.191 anak usia 7-12 tahun, 12, % dari sekitar 14.145.659 anak usia 13-15 tahun, dan 4 % dari keseluruhan remaja usia 16-18 tahun. Dibanding dengan tahun sebelumnya, perkembangan ini mengalami peningkatan 1,8 % untuk madrasah tingkat Ibtidaiyyah dan 3,9 % untuk madrasah tingkat Tsanawiyah.⁹

5) Masa Depan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam di Indonesia secara normatif pada dasarnya bersumber dari ajaran agama yang universal. Konsisten dengan prinsip ini, pendidikan Islam akan mampu bertahan dalam perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Prinsip universal itu menunjukkan kesanggupannya untuk di satu sisi mempertahankan semangat keislamannya dan di sisi lain menyesuaikan aspek teknisnya dengan perkembangan jaman. Sebagaimana dapat dilihat dalam sejarah, pendidikan Islam memperlihatkan variasi dari satu periode ke periode lain, dan dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi dengan semangat keislaman yang permanen.

Masa depan pendidikan Islam di Indonesia ditentukan baik oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal. Secara internal, dunia pendidikan Islam pada dasarnya masih menghadapi problem pokok berupa rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengelola pendidikan. Hal itu terkait dengan program pendidikan dan pembinaan tenaga kependidikan yang masih lemah dan pola rekrutmen tenaga pegawai yang kurang selektif. Namun demikian, *trend* dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa penyelesaian atas masalah sumber daya manusia itu mengalami penanganan semakin baik. Di samping adanya usaha perbaikan pada lembaga-lembaga pendidikan, sejak tiga tahun terakhir ini telah diselenggarakan program-program pelatihan dalam berbagai bidang dan profesi kependidikan, mulai dari pimpinan sekolah, pengelola administrasi dan keuangan, pustakawan, guru, tenaga bimbingan dan penyuluhan, pengawas, sampai dengan pengurus organisasi orang tua siswa. Dalam jangka panjang, tenaga-tenaga yang terlatih itu akan menyebarkan pengetahuan dan keterampilannya kepada rekan sejawat (*peer-group*),

⁹Data lebih sempurna mengenai berbagai aspek pendidikan madrasah di Indonesia, dapat diakses melalui situs dan penerbitan *Education Management Information System (EMIS)* Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

sehingga secara bertahap akan meningkatkan kinerja lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah.¹⁰

Secara eksternal, masa depan pendidikan Islam dipengaruhi oleh tiga isu besar, yaitu globalisasi, demokratisasi dan liberalisasi Islam. Globalisasi tidak semata-mata mempengaruhi sistem pasar, tetapi juga sistem pendidikan. Penetrasi budaya global terhadap kehidupan masyarakat Indonesia akan direspons secara berbeda-beda oleh kalangan pendidikan, baik permisif, defensif ataupun transformatif. Kelompok pertama akan cenderung menerima begitu saja pola dan model budaya global yang dialirkan melalui teknologi informasi, tanpa memahami nilai dan substansinya. Sebaliknya, kelompok kedua akan *apriori* terhadap capaian budaya dan peradaban global, semata-mata karena hal itu tidak datang dari tradisi yang diikutinya selama ini. Sedangkan kelompok ketiga berusaha mendialogkan antara budaya global dengan budaya lokal sehingga terjadi sintesis budaya yang dinamis dan harmonis.

Demokratisasi merupakan isu lain yang mempengaruhi masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Tuntutan demokratisasi pada awalnya ditujukan kepada sistem politik negara sebagai “perlawanan” terhadap sistem politik otoriter. Dalam perkembangannya, tuntutan ini mengarah kepada sistem pengelolaan berbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan. Jika sebelumnya sistem pendidikan bersifat sentralistik, seragam dan dependen, maka belakangan berkembang tuntutan pengelolaan pendidikan yang lebih otonom dan beragam. Di samping itu, tuntutan partisipasi masyarakat khususnya dalam pengawasan mutu pendidikan semakin meningkat, yang menuntut pengelolaan pendidikan dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab. Termasuk ke dalam tuntutan demokratisasi ini adalah menggeser paradigma pendidikan agar lebih menekankan kepada peran siswa secara aktif.

Di samping kedua isu di atas, hal lain yang sangat penting bagi perkembangan masa depan pendidikan Islam adalah masalah liberalisasi Islam. Agama ini telah berkembang dan dipeluk oleh berbagai komunitas yang sangat beragam dan kompleks. Hal ini meniscayakan adanya proses dialektika antara ajaran Islam dengan kondisi lokal sehingga menghasilkan pemahaman agama yang fungsional dapat berlaku dalam lingkungan pemeluknya. Sementara itu, perkembangan dalam berbagai kehidupan mutakhir sebagian tidak mendapatkan penjelasan yang cukup tegas dari teks-teks suci. Padahal, jawaban agama atas masalah-masalah yang baru muncul itu tidak boleh absen. Dalam hal ini

¹⁰Pelatihan-pelatihan dilakukan dalam proyek bantuan dan kerjasama internasional dengan dukungan Asian Development Bank, seperti Basic Education Project.

muncul tuntutan liberalisasi Islam, baik dalam perspektif yang ekstrim maupun perspektif yang moderat. Dalam pengertian ekstrim, liberalisasi Islam berarti mengabaikan sama sekali teks-teks suci ketika membahas isu-isu yang memang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalamnya. Sedangkan perspektif yang moderat menyadari perlunya penafsiran yang bebas terhadap teks-teks suci sejauh konsisten dengan nilai dasar yang dikandungnya, sehingga isu baru apapun yang berkembang dewasa ini pada dasarnya memiliki relevansi dengan esensi ajaran agama.

Pada masa lalu, pemahaman agama dicukupkan dengan fatwa dan penjelasan dari kalangan ulama yang terbatas. Tetapi, perkembangan dewasa ini menunjukkan adanya kemungkinan setiap orang memahami sendiri-sendiri ajaran agamanya. Hubungan umat dengan ulama tidak lagi berjalan seperti hubungan murid dengan guru. Kebutuhan orang terhadap pemahaman ajaran sebagian dapat dipenuhi dengan penyediaan buku dan penerbitan yang bisa terbaca setiap saat. Prasyarat-prasyarat tradisional bagi seseorang dalam memahami teks-teks suci cenderung diabaikan, karena adanya perangkat dan pendekatan kajian yang dipinjam dari disiplin dan bidang tertentu, dapat menjelaskan ajaran agama kepada publik, tanpa harus terlebih dahulu mencari justifikasi dari ulama atau lembaga fatwa formal.

6) Mempertegas Visi Pendidikan Islam

Dalam masa cukup panjang, pendidikan Islam di Indonesia berada di persimpangan jalan antara mempertahankan tradisi lama dan mengadopsi perkembangan baru. Upaya mempertahankan sepenuhnya tradisi lama berarti *status quo* yang menjadikannya terbelakang meskipun memuaskan secara emosional dan romantisme dengan identitas pendidikan Islam masa lalu. Sementara itu, mengadopsi perkembangan baru begitu saja berarti mengesampingkan akar sejati dan nilai otentik dari sejarah pendidikan Islam, meskipun berhasil memenuhi keperluan pragmatis untuk menjawab tantangan sesaat dari lingkungan sekitarnya. Situasi ini tercermin dalam kebingungan, maju-mundur dan ketidakjelasan arah dan tujuan modernisasi pendidikan Islam selama ini.

Jalan keluar dari situasi di atas menuntut adanya penegasan visi pendidikan Islam sehingga tidak tergodanya oleh tarikan-tarikan ekstrim, tetapi mampu mengelola berbagai kecenderungan yang tersedia secara responsif dan tuntas. Visi itu ditempatkan sebagai pemandu yang menjamin konsistensi pendidikan Islam dalam konteks perubahan dan dinamika yang terjadi dalam dirinya secara terus menerus. Kerangka visi pendidikan Islam itu harus dibangun dengan mempertimbangkan sumber nilai atau ajaran Islam, karakter

esensial dari sejarah pendidikan Islam dan rumusan tantangan masa depan. Dengan kata lain, visi pendidikan Islam masa depan adalah terciptanya sistem pendidikan yang Islami, populis, berorientasi mutu dan kebhinekaan.

Karakter Islami pada lembaga pendidikan Islam merupakan identitas utama yang harus tercermin dalam kurikulum dan proses pendidikan. Berbeda dengan lembaga pendidikan sekuler, pendidikan Islam dilaksanakan dengan mengejawantahkan nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan dan perilaku semua komponen pendidikan, mulai dari pimpinan sampai dengan siswa. Karakter Islami, yang pertama dan utama, berarti kesadaran sebagai pribadi muslim untuk menjalankan secara konsisten perintah dan larangan agama dalam segala situasi dan kondisi, termasuk di lingkungan madrasah. Selain itu, karakter Islami berarti orientasi pendidikan yang holistik dan tidak terbatas pada cita-cita praktis, karena menempatkan nilai-nilai spiritual dan transendental (ketuhanan) dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Karakter Islami juga berarti strategi pembelajaran keagamaan yang tidak verbalistik sehingga memudahkan siswa untuk mengembangkan ketrampilan dan wawasan keislamannya secara terpadu. Di samping ketiga makna di atas, karakter Islami dari pendidikan Islam itu berarti ajakan dan seruan bagi lingkungan sekitar madrasah untuk meningkatkan syiar Islam melalui media pembelajaran.

Karakter populis pada lembaga pendidikan Islam merupakan pesan utama dari sejarah pendidikan Islam di Indonesia dari masa ke masa. Sejak periode awal, pendidikan Islam lahir dan berkembang dengan dukungan masyarakat serta terbuka bagi semua lapisan sosial. Dalam banyak kasus, sekali mengabaikan watak populasinya, lembaga pendidikan Islam akan mengalami kematian karena ditinggalkan oleh masa pendukungnya. Program keunggulan pendidikan Islam, seperti madrasah model, tidak dimaksudkan untuk membuat lembaga pendidikan itu bersifat eksklusif. Watak populis dari pendidikan Islam ini sangat relevan dengan tuntutan esensial umat manusia sepanjang masa yang membutuhkan persaudaraan, saling kasih dan semangat memberdayakan kaum tertindas. Dengan kata lain, pendidikan Islam hendaknya dilaksanakan dalam semangat merakyat sehingga melahirkan hasil pendidikan yang berprestasi dan sekaligus peduli dengan nasib sesama.

Ciri lain dari visi pendidikan Islam masa depan adalah berorientasi kepada mutu. Hal ini merupakan tantangan masa depan yang sangat nyata, karena penghargaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh tingkat kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan itu tercermin dalam dua tataran, yaitu proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan menggambarkan suasana pembelajaran yang aktif dan dinamis serta

konsisten dengan program dan target pembelajaran. Sedangkan hasil pendidikan menunjuk pada kualitas lulusan dalam bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. Jika gagal dalam mewujudkan visi ini, lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, akan tertinggal dari lembaga-lembaga pendidikan lain.

Karakter keragaman pendidikan Islam pada prinsipnya menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Praktek penyeragaman yang terjadi selama tiga dekade terakhir disadari telah mematikan kreatifitas pengelolaan dan pengembangan pendidikan Islam. Hal ini sekaligus bertentangan dengan watak populis yang meniscayakan adanya lembaga, model dan pendekatan pendidikan yang bervariasi sesuai dengan kompleksitas masyarakat. Pendidikan Islam hendaknya membiarkan, dengan pengelolaan yang baik, tumbuh dan berkembangnya aneka ragam lembaga pendidikan Islam, mulai dari pesantren, madrasah, majelis taklim, sampai dengan kelompok kajian *usra*. Dalam waktu bersamaan, setiap lembaga pendidikan Islam hendaknya juga dibiarkan berkembang dalam keanekaragaman tipe, mulai dari madrasah umum, madrasah kejuruan, madrasah keagamaan sampai dengan madrasah model. Sementara itu, dalam proses pembelajaran, pendidikan Islam dapat mengembangkan berbagai strategi yang menjamin efektifitas pendidikan. Pola pendekatan yang tunggal akan menimbulkan kejenuhan siswa dalam belajar.

7) Madrasah Terpadu

Salah satu model pendidikan yang dirancang sesuai dengan visi pendidikan Islam adalah konsep Madrasah Terpadu. Madrasah dalam berbagai jenjang MI, MTs dan MA ini pada dasarnya mengandung potensi dan kekuatan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Sementara itu, dalam waktu bersamaan, tersedia peluang dan tantangan yang menjanjikan, selain masalah-masalah yang problematik. Penanganan masalah dan pengelolaan potensi secara sendiri-sendiri tidak akan mencapai hasil pendidikan secara optimal. Sebaliknya, jika potensi dan kekuatan yang ada pada ketiga jenjang madrasah itu dipadukan, maka akan dapat memanfaatkan peluang dan tantangan secara maksimal.

Konsep Madrasah Terpadu dikembangkan berdasarkan beberapa prinsip. Pertama adalah menerapkan pendidikan madrasah secara berkelanjutan selama 12 tahun, mulai dari MI sampai dengan MA. Banyak siswa dari keluarga muslim menempuh pendidikan formalnya melalui madrasah hingga tingkat MA. Kedua adalah mewujudkan pendidikan madrasah yang memadukan mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama secara tuntas. Pemaduan kedua mata pelajaran itu menambah beban yang sangat berat bagi madrasah,

meskipun diharapkan dapat tercapai secara optimal. Ketiga adalah madrasah berorientasi kepada pendidikan manusia seutuhnya, antara kedalaman spiritual, keagungan akhlak, kemampuan ilmu atau intelektual dan keterampilan. Dengan prinsip ketiga ini, pendidikan madrasah berusaha untuk mewujudkan keseimbangan antara ilmu pengetahuan teknologi dengan iman takwa.

Di berbagai daerah, madrasah sering menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang tersedia bagi masyarakat, mulai dari jenjang MI sampai dengan MA. Seorang anak dari keluarga muslim misalnya menikmati pendidikannya selama 12 tahun di madrasah karena berbagai alasan. Sementara itu, pada umumnya diakui bahwa kualitas madrasah dari berbagai jenjang tidak sama. Situasi ini tentu kurang menguntungkan generasi muslim yang memanfaatkan pendidikan madrasah. Dengan konsep Madrasah Terpadu diidealisasikan terwujudnya kualitas pendidikan secara merata dari masing-masing jenjang madrasah dalam satu lokasi yang sama atau berdekatan.

Salah satu langkah untuk mewujudkan pemerataan mutu itu, konsep Madrasah Terpadu mengusahakan adanya integrasi dan penyelarasan kurikulum dari ketiga jenjang madrasah. Selama ini dirasakan adanya kesenjangan antara kurikulum madrasah dari jenjang satu dengan jenjang lainnya. Partisipan dari Madrasah Terpadu dituntut untuk menata kurikulum pendidikan sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran efektif. Beban pendidikan antar jenjang dalam pendidikan Madrasah Terpadu akan dapat diatur dengan tetap tidak mengurangi bobot kandungan kurikulumnya.

Perwujudan Madrasah Terpadu menuntut adanya manajemen pada setiap madrasah yang solid dan satu sama lain saling mendukung. Dengan konsep Madrasah Terpadu, perencanaan kebutuhan pendidikan bagi madrasah dari berbagai jenjang dalam satu lokasi itu dapat dilakukan secara bersama. Dari perencanaan bersama ini dapat dilanjutkan dengan penentuan prioritas yang disepakati bersama dengan masing-masing pihak memenuhi bagian-bagian tertentu yang saling melengkapi. Dalam satu periode pengajaran misalnya MI mengadakan laboratorium bahasa, MTs mengadakan perpustakaan dan MA memprogramkan pelatihan guru bersama. Secara kongkrit, manajemen bersama ini dapat diwujudkan dalam satu organisasi dan struktur yang beranggotakan semua pimpinan madrasah dari berbagai jenjang.

8) Manajemen : Langkah Praktis Mewujudkan Visi

Usaha untuk mewujudkan pendidikan Islam yang konsisten dengan visi di atas, memerlukan langkah-langkah praktis. Lembaga pendidikan Islam pertama-tama dituntut

untuk melakukan perubahan-perubahan strategis dalam bidang manajemen. Dalam hal ini pimpinan lembaga pendidikan Islam dituntut untuk memiliki visi, tanggungjawab, wawasan dan keterampilan manajerial yang tangguh. Pemimpin lembaga hendaknya mampu memainkan peran sebagai lokomotif perubahan menuju terciptanya lembaga pendidikan Islam berkualitas.

Untuk kepentingan ini, paradigma manajemen madrasah harus mengalami pergeseran dari paradigma lama ke paradigma baru, yaitu (1) dari posisi subordinatif ke posisi otonom, (2) dari strategi sentralistik ke strategi desentralistik, (3) dari pengambilan keputusan otoritatif ke pengambilan keputusan partisipatif, (4) dari pendekatan birokratik ke pendekatan profesional, (5) dari model penyeragaman ke model keragaman, (6) dari langkah praktis kaku ke langkah praktis luwes, (7) dari kebiasaan diatur ke kebiasaan berinisiatif, (8) dari serba regulasi ke deregulasi, (9) dari kemampuan mengontrol ke kemampuan mempengaruhi, (10) dari kesukaan mengawasi ke kesukaan memfasilitasi, (11) dari ketakutan dengan resiko ke keberanian mengelola resiko, (12) dari pembiayaan yang boros ke pembiayaan yang efisien, (13) dari kecerdasan individual ke kecerdasan kolektif atau *team work*, (14) dari informasi tertutup ke informasi terbagi dan terbuka, (15) dari pendelegasian ke pemberdayaan, (16) dari organisasi hirarkis ke organisasi egaliter.

Dengan paradigma manajemen di atas, pimpinan madrasah dituntut untuk melakukan langkah-langkah ke arah perwujudan visi madrasah yang agamis, populis, berkualitas dan beragam. Di antara langkah-langkah itu adalah sebagai berikut, (1) membangun kepemimpinan madrasah yang kuat dengan meningkatkan koordinasi, menggerakkan semua komponen madrasah, mensinergikan semua potensi, merangsang perumusan tahapan-tahapan perwujudan visi dan misi madrasah serta mengambil prakarsa yang berani dalam pembaharuan, (2) melaksanakan manajemen madrasah yang terbuka dalam hal pengambilan keputusan dan penggunaan keuangan madrasah. Untuk menjamin keterbukaan ini, manajemen madrasah hendaknya memungkinkan pengawasan dari masyarakat atau pihak lain, (3) mengembangkan tim kerja yang solid, cerdas dan dinamis. Manajemen madrasah harus berpegang kepada prinsip bahwa mutu pendidikan terletak pada kolektivitas kerja. Dengan demikian, hasil pendidikan diakui sebagai hasil bersama, bukan hasil perorangan. Hal ini menuntut sikap pimpinan madrasah yang terbiasa untuk bekerja kolektif sesuai dengan fungsi masing-masing individu, (4) mengupayakan kemandirian madrasah untuk melakukan langkah terbaik bagi madrasah. Pimpinan madrasah dituntut untuk mengandalkan kemauan, kemampuan dan kesanggupannya

sendiri tanpa harus menunggu petunjuk dan perintah atasan. Hal ini tentu saja harus dibarengi dengan upaya peningkatan sumberdaya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, (5) menciptakan proses pembelajaran efektif, yang dicirikan oleh beberapa hal, yaitu (a) proses pembelajaran memberdayakan siswa untuk aktif dan partisipatif, (b) target pembelajaran tidak terbatas pada hapalan, tetapi sampai dengan pemahaman yang ekspresif, (c) mengutamakan proses internalisasi ajaran agama dengan kesadaran sendiri, (d) merangsang siswa untuk mempelajari berbagai cara belajar atau *learning how to learn*, (e) menciptakan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas.

C. Penutup

Uraian di atas membatasi pembahasan tentang pendidikan Islam lebih pada problem madrasah. Di luar itu, dunia pendidikan di Indonesia sebetulnya meliputi juga lembaga-lembaga lain, seperti pesantren dan perguruan tinggi Islam. Kedua lembaga yang disebut terakhir ini memang memiliki masalahnya sendiri, yang sangat pelik dan kompleks. Namun demikian, terlepas dari kenyataan itu, agaknya diakui bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan Islam *parexcellence* di Indonesia dalam dekade terakhir. Di samping itu, kebanyakan problem pendidikan madrasah juga merupakan problem universal dalam pendidikan Islam. Dengan demikian, problem madrasah yang secara khusus didiskusikan dalam tulisan ini masih tetap relevan dengan problem yang dihadapi lembaga pendidikan Islam lainnya.

Menjadi suatu keniscayaan untuk melakukan perubahan ke arah madrasah yang lebih agamis, populis berkualitas dan beranekaragam. Modal dasar untuk melakukan perubahan itu sudah tersedia dari pesan sejarah pendidikan Islam itu sendiri. Tantangannya adalah merumuskan secara tepat perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat kontemporer dan kondisi masa depan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah responsif yang efektif. Kemampuan dalam merespons tuntutan dan tantangan di atas akan menambah optimisme kaum muslim bahwa madrasah dengan visi dan karakternya yang agamis, populis, berkualitas dan beragam, akan menjadi model pendidikan pilihan masa depan karena beberapa keunggulan yang dimiliki. Tentu saja dalam kenyataannya, perwujudan optimisme itu tergantung pada komitmen umat Islam dan pola manajemen pengelolaan madrasah itu sendiri.*

BIBLIOGRAPHY

Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning*. Bandung : Mizan, 1995.

Departemen Agama. *Sejarah Perkembangan Madrasah*. Jakarta : Departemen Agama RI, 1999.

Al-Faruqi, Ismail Raji dan Losi Lamnya' al-Faruqi. *The Cultural Atlas of Islam*. New York : Macmillan Publishing Company, 1986.

Makdisi, George. *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*. Edinburgh : Edinburgh University Press, 1981.

_____. *The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West*. Edinburgh : Edinburgh University, 1990.

Maksum. *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta : Logos, 1999.

Nakosteen, Mehdi. *History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350*. Boulder : University of Colorado Press, 1964.

Rosenthal, Franz. *Knowledge Triumphant*. Leiden : E.J. Brill, 1970.

_____. "Muslim Definitions of Knowledge," dalam *The Conflict of Traditionalism and Modernism in the Middle East*. Austin : The Humanities Research Centre, 1966.

Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah*. Jakarta : LP3ES, 1986.